

# **SOSIALISASI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014**

Oleh:  
**ENDANG**  
NIM. E02112071

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: [Endangandryangriany@gmail.com](mailto:Endangandryangriany@gmail.com)

## **Abstrak**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Latar belakang Partai Keadilan Sejahtera ini masih bersifat tertutup hal ini menjadi objek kajian menarik bagi peneliti, sifat Partai Keadilan Sejahtera tersebut membuat masyarakat kurang simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang lalu. Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur mempunyai partisipasi yang tinggi dalam pemilu, adanya hubungan ikatan-ikatan tertentu (agama) tidak mempengaruhi suara masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian peneliti menggunakan tiga faktor penghambat menurut Rush dan Althoff (2002), bahwa faktor yang menyebabkan sosialisasi politik belum berjalan optimal di gunakan tiga faktor penghambat, yaitu pola sosialisasi politik, sosial ekonomi, dan sistem politik. Kemudian hasil analisis peneliti melalui tiga faktor penghambat tersebut bahwa Partai Keadilan Sejahtera sosialisasi politiknya belum berjalan optimal yang di pengaruhi oleh faktor pola sosialisasi politik.

Kata-kata Kunci : Sosialisasi Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu Legislatif.

## **Abstract**

This study aims to determine the political socialization of the Prosperous Justice Party in the Eastern District of Pontianak in legislative elections in 2014. This study used qualitative research methods to the type of research that is descriptive. The background of the Prosperous Justice Party is still closed this becomes the object of study of interest to researchers, the nature of the Prosperous Justice Party is making people less sympathetic to the Prosperous Justice Party to vote in legislative elections in 2014 ago. The people in the district of East Pontianak has participation high in the election, the relationship of certain bonds (religion) does not affect the sound of the people in the district of East Pontianak in legislative elections in 2014. To answer the problem in the study researchers used three factors inhibiting according to Rush and Althoff (2002), that the factors that led to the political socialization not run optimally used three inhibiting factor, namely the socialization patterns of political, social, economic, and political systems. Then the results of our analysis in three inhibiting factor, namely the Prosperous Justice Party has not run optimally political socialization is influenced by factors of political socialization patterns.

*Keywords: Political Socialization, the Prosperous Justice Party, Legislative Election.*

## A. PENDAHULUAN

### A.1 Latar Belakang Masalah

Pasca lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, elite KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai poliitik Islam. Para kader utama KAMMI akhirnya membuat semacam survei internal untuk mengetahui opini didalam tubuh gerakan itu sendiri. Hasil survei membuktikan bahwa mayoritas aktivis KAMMI setuju untuk mendirikan partai yang kemudian diberi nama Partai Keadilan. Meski didukung oleh sejumlah elite KAMMI, tak ada hubungan formal antara organisasi mahasiswa ini dengan Partai Keadilan. Namun dalam perjalannya hubungan keduanya tampak lekat. Bahkan KAMMI dianggap sebagai organisasi sayap Partai Keadilan.

Pada pemilu 1999, Partai Keadilan tampil sebagai kekuatan politik baru yang cukup diperhitungkan. Berbeda dengan partai islam lain yang masih bergantung pada figure yang kuat, Partai Keadilan muncul dengan organisasi yang modern, transparan, dan kader-kader terpelajar. Meski mendapatkan simpati dari pemilih, kesan eksklusif yang ditunjukkan Partai Keadilan ketika itu menjadi batu sandungan

bagi perolehan suara partai tersebut. Partai dakwah itu memang di pimpin oleh mereka yang berpendidikan tinggi namun ketika diadakan pertemuan laki-laki dan perempuan duduk terpisah. Partai ini juga di anggap lebih mementingkan agama ketimbang suara pemilih.

Pemilu pertama di era Reformasi yang diadakan pada tanggal 7 Juli 1999, Partai Keadilan sendiri terbukti gagal memperoleh batas minim suara sebagai syarat mengikuti pemilu selanjutnya. Ketertutupan Partai Keadilan menjadi salah satu penyebab anjloknya suara di pemilu. Gagal mencapai electoral threshold membuat Partai Keadilan bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang di larang saat kampanye. Seperti yang di jelaskan pada Pelarangan kampanye di dalam rumah ibadah dan fasilitas pemerintah diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Aturan serupa tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

Salah satu fungsi partai politik yang di maksudkan adalah sosialisasi politik. Peranan sosialisasi politik yang di lakukan Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan pemilu legislatif tidak menunjukkan adanya usaha yang konkrit yang dilakukan oleh anggota maupun para calon legislatif untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat. Adapun sosialisasi politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur yaitu sosialisasi melalui spanduk, baliho, dakwah serta mengajak masyarakat berkumpul di masjid.

Walaupun sosialisasi politik yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur dilakukan jauh-jauh hari sebelum akan dilaksanakannya pemilu legislatif, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berada di Kecamatan Pontianak Timur tidak memberikan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera. Meskipun Partai Keadilan Sejahtera merupakan Partai Islam, sedangkan di Kecamatan Pontianak Timur mayoritas orang muslim dengan suku melayu dan Madura, tetapi tidak

mempengaruhi masyarakat untuk mendukung Partai Keadilan Sejahtera karena masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur memilih calon legislatif tidak berdasarkan agama, tetapi dari pantas atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota legislatif. Peran aktif dari calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur dalam mensosialisasikan kegiatan yang bermanfaat agar masyarakat memberikan suara mereka untuk Partai Keadilan Sejahtera.

Dari hasil pra penelitian yang di dapatkan hasil data pemilih tahun 2009 di Kecamatan Pontianak Timur daerah pilihan 4 berjumlah 35.326 orang, sedangkan jumlah suara yang sah Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 2.096 orang dan di peringkat ke VII. Pada tahun 2014 jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Timur yaitu sebanyak 46.899 orang, sedangkan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera pada Tahun 2014 yaitu 2.404 orang. Dengan jumlah demikian Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada tahun 2009 dan 2014 tidak mendapatkan kursi DPRD. Jadi pada Partai Keadilan Sejahtera tidak ada peningkatan dalam Pemilihan Umum calon Legislatif. (KPU kota Pontianak)

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul “Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”. Titik pusat penelitian ini berada di Kecamatan Pontianak Timur.

### **A. 2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang. Maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu: Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Sosialisasi politik yang peneliti gunakan sebagai pisau penelitian adalah faktor penghambat untuk melihat sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff (2002: 37) yaitu: kendala pola sosialisasi politik, kendala sosial ekonomi dan kendala sistem politik. Dimana dari tiga kendala tersebut peneliti fokus pada satu kendala yaitu: kendala pola sosialisasi politik.

### **A. 3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan pada latarbelakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

### **A. 4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu politik khususnya kajian sosialisasi politik, serta dapat dijadikan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat di jadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran baik untuk Partai Keadilan Sejahtera maupun partai lainnya dan serta menambah kajian teori perilaku politik.

## A. 5. Tinjauan Pustaka

### A. 5.1. Partai Politik

Menurut Nurul (2009:87) Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, maupul maupun materil. Cara ingin mengemukakan keinginan rakyat melalui parpol ini mengandung pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian, suatu partai politik hanya dapat ada dengan sesungguhnya jika ada kesekurang-kurangnya satu kelompok lain yang menyanginya.

Menurut Budiardjo (1996:163), ada empat fungsi partai politik, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.

#### 2. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu Negara.

#### 3. Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan

sejumlah peran dalam system politik ataupun pemerintah.

#### 4. Sarana Pengatur Konflik

Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Partai politik juga menjadi sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui perjuangannya dalam pemilihan umum partai politik harus menciptakan dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan “image” bahwa ia mewakili rakyat, karena itu selain menanamkan solidaritas dengan partai, juga harus dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga Negara dengan berusaha menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional (Budiardjo, 1996:164). Sosialisasi menunjukan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. (Almond,1990:67).

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum.

#### **A. 5. 2. Pemilihan Umum**

Menurut Ramlan (2007:147) Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio maupun visual serta media lainnya seperti, spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk tatap muka yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna

meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan umum merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi, yang populis, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. (Moesafa dan Prihatmoko, 2008:43)

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon dari caleg tersebut. Kampanye merupakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang di laksanakan secara tanggung jawab, di laksanakan oleh partai politik atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU sesuai daerah pemilihan. Melakukan kampanye di tempat ibadah adalah kegiatan yang dilarang.

Dalam Undang-Undang 8 tahun 2012 pasal 86 tentang 'Larangan Kampanye', diatur tegas hal-hal yang dilarang. Yaitu:

- A. Mempersoalkan dasar negara pancasila, UUD, dan bentuk NKRI

- B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
- C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain.
- D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
- E. Mengganggu ketertiban umum
- F. Mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang/sekelompok masyarakat dan atau peserta pemilu lain.
- G. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu lain
- H. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan.
- I. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atribut selain dari peserta pemilu bersangkutan
- J. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye.

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang di larang saat kampanye. Seperti yang di jelaskan pada Pelarangan kampanye di dalam rumah ibadah dan fasilitas pemerintah diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi pelaksana,

peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Aturan serupa tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

### **A.5.3. Konsep Sosialisasi Politik**

Menurut David (1961), sosialisasi politik merupakan pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu berbagai keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan ), motif, dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang di antisipasikan (dan terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia norma dan peranan-peranan baru masih dipelajari (dalam Gatara dan Said, 2007 : 77).

Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Sosialisasi politik juga merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-

reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik merupakan proses yang berlangsung lama yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush dan Althoff,2011 :47)

Adapun Fungsi sosialisasi menurut Rush dan Althoff adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Misalnya di Indonesia menganut ideologi negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi diberlakukan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum.

b. Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri ? Mereka akan menjadi warga negara tanpa identitas, tentunya.

Sosialisasi politik sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, jika proses sosialisasi politik tidak dapat berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan situasi politik suatu Negara. Karena sosialisasi politik merupakan faktor terpenting bagi setiap individu maupun kelompok yang berada di wilayah tersebut.

Menurut Rush dan Althoff (2002-37) mengemukakan beberapa unsur kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosialisasi politik belum berjalan secara optimal antara lain :

a. Kendala pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya.

- b. Kendala Sosial ekonomi yakni lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai dalam membangun suatu organisasi politik dan rendahnya tentang pengetahuan politik menyebabkan beban ganda bagi partai tersebut.
- c. Kendala Sistem politik yakni keseimbangan dalam partai politik selalu berubah sehingga system politik dalam sebuah partai politik lebih bersifat dinamis dari pada statis.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana dalam penelitian ini yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai fenomena-fenomena politik yang terjadi di Kecamatan Pontianak Timur.

Harrison (2009:91) mengungkapkan bahwa riset politik dengan metode kualitatif cenderung punya banyak kualitas yang "personable". Artinya, kita dapat mengenal orang atau kelompok orang yang kita riset, sering kali tingkat pengenalan kita melebihi dari yang semestinya dibutuhkan untuk

proyek riset, bahkan periset bisa melihat dunia politik dari perspektif mereka.

Subjek dalam penelitian untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada calon terpilih. Kemudian yang dijadikan subjek disini penulis menentukan informan, yaitu:

1. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pontianak
2. 3 orang calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera daerah pilihan 4
3. 3 orang Tokoh masyarakat Kecamatan Pontianak Timur
4. 3 orang Masyarakat Kecamatan Pontianak Timur

Adapun objek penelitian ini adalah Sosialisasi Politik Partai Keadlan Sejahtera Di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri, yaitu instrumen dalam wawancara, pedoman wawancara (interview guide) berupa daftar pertanyaan yang tujuannya adalah agar pertanyaan tidak keluar dari fokus penelitian.

Dalam melakukan sebuah penelitian biasanya menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Tujuannya supaya data yang dikumpulkan berupa yang valid dan akurat bukan data yang sembarangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:223), bahwa: Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan sebagai instrumen penelitian utama

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang dilakukan untuk menganalisa dan menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk memeriksa keabsahan data.

Penelitian menggunakan triangulasi dalam penelitian ini adalah mengacu pada pendapat Moleong (2004 :330) sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Faktor Penghambat Sosialisasi Politik

Dalam hubungannya dengan sosialisasi politik, partai politik menjadi sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui perjuangannya dalam pemilihan umum partai politik harus menciptakan dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan image bahwa ia mewakili rakyat, karena itu selain menanamkan solidaritas dengan partai, juga harus dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara dengan berusaha menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan nasional (Budiardjo, 1996:164). Partai politik apapun itu akan melaksanakan fungsi partai politik yang sama tetapi sebagaimana dasarnya partai politik merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang bersatu, pastilah memiliki tujuan partai politik sebagai warna dalam partainya.

Demikian juga pada Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki tujuan dan pergerakan. Partai Keadilan Sejahtera sebenarnya sudah menjalankan fungsi fungsi partai politik dengan baik, akan tetapi dalam

upaya sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 belum berjalan dengan optimal di karenakan Partai Keadilan Sejahtera masih tertutup, kurang membaur terhadap masyarakat dan tidak mengambil simpati masyarakat untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Karena inilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, sosialisasi politik merupakan pewaris nilai-nilai politik dari satu generasi kegenerasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik juga dipengaruhi oleh status Sosial Ekonomi masyarakat pada suatu bangsa yang tentunya sangat berpengaruh pada budaya politik suatu bangsa. Dalam hal ini yang menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam masyarakat adalah : keluarga, sekolah, peer group atau kontak langsung, pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik berperan dalam mengubah pertahanan dan budaya politik. Dalam kontek politik negara indonesia dengan sistem demokrasi

indonesia yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak langsung arah politik indonesia mengarah pada kandungan yang terdapat dalam pancasila itu sendiri.

### **C. 2. Kendala Pola Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.

Sebagai agen sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera harus dapat mensosialisasikan partainya melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga dapat diterima masyarakat agar masyarakat simpati kepada Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Pola sosialisasi yang tepat di dalam suatu partai akan mudah diterima oleh para kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dan sebaliknya juga jika pola sosialisasi tersebut tertutup dan belum optimal akan terjadinya kegagalan dan tidak dapat diterima oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur.

### **C. 3. Kendala Sosial Ekonomi**

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang mengenai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, pengaturan rumah tangga keadaan sosial ekonomi yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan yang di hadapi, hal ini di sebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut.

Kondisi sosial ekonomi memainkan peran yang menentukan dalam sebuah partai politik baik dalam negara yang baru berkembang maupun pada negara yang sudah mantap. Status sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung pada lembaga-lembaga publik yang formal. Persoalan ekonomi tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk di dalamnya. Untuk membentuk sebuah organisasi yang sempurna perlu biaya yang sangat besar karena dengan demikian kesediaan anggaran dana besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki.

### **C.4. Kendala Sosial Ekonomi**

Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana

memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara.

Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat yang berusaha mencapai tujuan-tujuan mereka. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sistem politik harus selalu seimbang dan mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. dan memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Sistem politik di haruskan melakukan pengelolaan yang terstruktur agar sistem politik yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan sistem politik di lakukan juga harus sesuai dengan sistem yang berlaku. Seperti sistem politik dalam menarik kader, tidak semua orang dapat masuk dalam sebuah partai jika orang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat menjadi kader.

## D. KESIMPULAN

Dari tiga faktor penghambat sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 seperti pola sosialisasi, sosial ekonomi dan sistem politik penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala pola sosialisasi politik lah yang sangat berpengaruh dalam terhambatnya sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pontianak Timur pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

### 1. Kendala Pola Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Kendala pola sosialisasi politik merupakan tahapan-tahapan yang dilalui suatu partai dalam pelaksanaan sosialisasi politiknya.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa : anggota Partai Keadilan Sejahtera menganggap dirinya sudah melakukan sosialisasi politik terbuka dan di tempat umum,

namun pada kenyataannya di lapangan bahwa masyarakat masih menganggap Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai tertutup dan setiap melakukan sosialisasi hanya pada majelis ta'lim. dan Partai Keadilan sejahtera pun kurang membaur kepada masyarakat Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera kurang mendapatkan simpati dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur. Sosialisasi yang mereka gunakan selalu demikian tidak pernah dari mereka untuk merubah sosialisasi ketempat-tempat umum agar masyarakat dapat melihat secara langsung sosialisasi politik tersebut.

### 2. Kendala Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang mengenai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai kemakmuran hidupnya, pengaturan rumah tangga keadaan sosial ekonomi yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan yang di hadapi, hal ini di sebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Sosial ekonomi yakni lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai dalam membangun suatu organisasi politik dan

rendahnya tentang pengetahuan politik menyebabkan beban ganda bagi partai tersebut.

Persoalan ekonomi tidak dapat dipungkiri sebagai aspek yang berpengaruh bagi sebuah partai politik dalam membangun sebuah lembaga organisasi yang telah dibentuk di dalamnya. Untuk membentuk sebuah organisasi yang sempurna perlu biaya yang sangat besar karena dengan demikian kesediaan anggaran dana besar menurunkan hal yang mutlak harus dimiliki. Seperti pada Partai Keadilan Sejahtera ketika dalam melakukan sebuah kegiatan seperti dalam melakukan sosialisasi politik Partai Keadilan Sejahtera terdapat kendala berupa dana yang terkadang membuat kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

### 3. Kendala Sistem Politik

Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara

singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Sistem politik yakni keseimbangan dalam partai politik selalu berubah sehingga system politik dalam sebuah partai politik lebih bersifat dinamis dari pada statis.

Sebuah organisasi partai akan kuat apabila sistem politik dari partai tersebut sudah mantap, karena sebuah partai akan menjadi penting apabila dapat mempengaruhi kapasitas sistem politik untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan untuk mendapatkan partisipasi politik. Faktor kurangnya saluran kelembagaan yang diperlukan Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan sosialisasi menjadi penghambat sistem politik mereka.

### E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya setiap melakukan sosialisasi politik harus terbuka, di tempat umum dan bukan pada majelis ta'lim, meskipun Partai Keadilan Sejahtera

merupakan partai islam tetapi tidak semua masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur itu islam, ada juga beberapa masyarakat yang beragama nonmuslim. Sebaiknya jangan terlalu mengedepankan agama untuk menarik simpati masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat menerima sosialisasi politik melalui agama ataupun majelis ta'lim. Sudah seharusnya bagi Partai Keadilan Sejahtera merubah tempat sosialisasi politik yang di lakukan dari masjid ketempat umum dan awalnya tertutup merubah menjadi terbuka, agar semua masyarakat dapat melihat atau ikut serta dalam sosialisasi politik tersebut.

2. Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan dengan ekonomi yang besar, akan tetapi masih ada juga kegiatan yang bersifat positif yang hanya memerlukan ekonomi yang sedikit, jadi jangan tunggu ada dana yang banyak dulu baru melakukan setiap kegiatan. Karena untuk menarik simpati masyarakat tidak hanya dengan kegiatan yang mewah atau besar, kegiatan yang kecil juga dapat menarik simpati masyarakat tetapi kegiatan tersebut harus bermanfaat buat masyarakat. Sedangkan untuk mendapatkan dana

seharusnya jangan hanya mengharapkan sumbangan dari kader-kader, tetapi buatlah sebuah usaha agar dapat membatu ekonomi pada Partai Keadilan Sejahtera.

3. Seharusnya sistem politik harus dibuat sedemikian mantap agar sistem politik pada Partai Keadilan Sejahtera bisa berjalan dengan lancar.

## F. REFERENSI

Almond, Gabriel. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, Dasim dan Dikdik Baehaqi Arif. 2008. *Pemilihan Umum*. Bandung : Genesindo

E.Yuga, Tim Divanto. 2014. *Profil Partai Politik*. Surabaya : Erlangga.

Gatara, Said. Dan Dzulkiah Said. 2007. *Sosialisasi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung : Pustaka Setia

Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta

Moleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rajawali Rosda Karya

Moestafa dan Joko J. Prihatmoko.2008.  
***Menang Pemilu di tengah Oligarki  
Partai.*** Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2009.  
***Sosiologi dan Politik.*** Jakarta : Rajawali  
Pers

Rahman.2007. ***Sistem Politik  
Indonesia.*** Yogyakarta : Graha Ilmu

Rianse, Usman dan Abdi. 2009. ***Metodologi  
Penelitian Sosial dan Ekonomi.*** Bandung :  
Alfabeta

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2008.  
***Pengantar Sosiologi Politik.*** Jakarta :  
Rajawali Pers

Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2011.  
***Pengantar Sosiologi Politik.*** Jakarta :  
Rajagrafindo Persada

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.***bandung :  
Alfabeta

## **SKRIPSI**

Yenny Wahyunny (2015) dengan judul  
“Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik  
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di  
Kabupaten Kubu Raya

Eparia (2015) dengan judul “Pelaksanaan  
Fungsi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan  
Umum Kota Pontianak pada Pemilihan  
Umum Legislatif 2014 (Studi di Kelurahan  
Darat Sekip Kota Pontianak Provinsi  
Kalimantan Barat)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Endang  
 NIM / Periode lulus : E02112071 / I (2016-2017)  
 Tanggal Lulus : 10 Oktober 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP/ Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 E-mail address/ HP : Endangandryangriany@gmail.com / 082255169683

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ...ASPIRASI...\*) pada Program Studi ILMU POLITIK..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  
di Kecamatan Pontianak Timur Pada Pemilihan Umum Legislatif  
tahun 2014

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal

Dr. Fiki N.  
 NIP. 197408102002122002

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 24 November 2016

Endang  
 NIM. E02112071

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika Governance Aspirasi Sociodem Sociotogique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada ~~step~~ upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)